

## ***Fraud detection dan fraud prevention dalam upaya tindakan kecurangan laporan keuangan desa***

**Ayu**

Universitas Muhammadiyah Palopo

Email: [ayu.jannah1206@gmail.com](mailto:ayu.jannah1206@gmail.com)

**Rahmawati**

Universitas Muhammadiyah Palopo

Email: [rahmawati345@yahoo.co.id](mailto:rahmawati345@yahoo.co.id)

**Abid Ramadhan**

Universitas Muhammadiyah Palopo

Email: [abidramadhan8@gmail.com](mailto:abidramadhan8@gmail.com)

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Fraud detection dan fraud prevention terhadap proses pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di desa Tabbaja dan Desa Libukang di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survey. Sampel pada penelitian ini adalah aparatur desa dengan kriteria masa jabatan sudah melebihi 1 tahun. Jumlah aparat desa yang memenuhi kriteria sampling tersebut adalah sebanyak 30 orang responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang digunakan berupa opini dari subyek penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei yaitu melalui kuesioner yang mendapat bantuan dana desa. Data hasil jawaban kuesioner dari responden diuji dengan analisis regresi linier berganda dan menghasilkan bahwa variabel pengaruh Fraud detection dan fraud prevention memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci** *akuntabilitas; kompetensi sumber daya manusia; fraud; dana desa*

### **I. PENDAHULUAN**

Laporan keuangan merupakan media informasi yang sangat penting karena sifatnya yang lengkap dan mampu mempengaruhi keputusan yang akan dibuat. Ada dua jenis aktivitas penipuan, yaitu penggelapan aset dan penipuan akuntansi. Tindakan kecurangan terkait laporan keuangan telah meningkatkan perhatian publik terhadap keandalan laporan keuangan. Penipuan mengacu pada setiap tindakan yang salah menggambarkan fakta material, mengarah pada penipuan dan dapat menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan pihak lain. Pengguna laporan keuangan sangat bergantung pada informasi dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan harus menyediakan informasi yang relevan dan mekanisme pelaporan keuangan (Mardianto & Tiono, 2019).

Pentingnya penggunaan laporan keuangan mendorong perusahaan atau organisasi untuk menyajikan laporan keuangan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan penggunanya, namun hal ini justru dapat membawa risiko penipuan yang tinggi (Putra & Kusnoegroho, 2021).

Dana desa adalah anggaran dana yang diamatkan kepada aparat desa untuk dikelola demi kemaslahatan desanya. Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) salah satu asal pendapatan desa ialah dana perimbangan keuangan pusat dan wilayah yang diterima kabupaten atau kota yang disalurkan secara proporsional dalam penyaluran masing-masing desa, yaitu paling sedikit 10%, yang diklaim menggunakan alokasi dana desa, setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar buat disalurkan ke pedesaan pada seluruh Indonesia. Mulai tahun 2015 – 2019 dana desa yang di anggarkan oleh pemerintah akan terus meningkat dari setiap tahun. Dana desa menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan pedesaan, dan berbagi perekonomian pedesaan, oleh karena itu, bila anggaran dikelola menggunakan benar dan amanah maka yang akan terjadi berasal aktivitas otonomi desa, khususnya pemberdayaan rakyat akan terlihat jelas. Dana desa dan alokasi dana desa artinya pertanggungjawabannya adalah bagian yang termasuk asal akuntabilitas keuangan publik pada saat ini, rentan terjadinya potensi penyelewengan pada akuntabilitas keuangan publik. Maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) pada hal akuntabilitas dana desa dan alokasi dana desa (Fathia & Indriani, 2022).

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memperoleh uang, aset, dan lain-lain dengan tujuan untuk menipu orang lain atau pihak tertentu. Karena godaan untuk menggunakan taktik yang tidak jujur untuk menghasilkan uang, Penipuan akuntansi sering terjadi sebagai akibat dari banyak prospek organisasi yang belum dimanfaatkan semakin banyak peluang yang dihasilkan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi (Dewi & Rasmini, 2019).

Kemunculan penipuan sebenarnya berbeda dengan bug, tetapi mendeteksi penipuan lebih sulit karena biasanya kabur. Kerahasiaan mengacu pada akuntansi dan dokumen terkait, dan ini juga mengacu pada tanggapan penipu terhadap permintaan auditor selama audit. Ketika auditor meminta bukti transaksi curang, ia menipu dengan memberikan informasi palsu atau tidak lengkap. Pencegahan penipuan adalah untuk mengurangi kejadian penipuan dalam pengelolaan uang desa. Kegiatan ini merupakan upaya pengendalian, termasuk pengendalian intern dalam pemerintahan desa. Kontrol juga dapat dicapai dengan memilih pegawai negeri dengan standar moral yang tinggi. peralatan profesional Demikian pula karyawan yang memiliki pola pikir whistleblowing. Penipuan adalah tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang merugikan orang dan uang organisasi (Lestari, et al., 2019). Penipuan dana desa adalah pencurian dana desa yang ditujukan untuk perekonomian masyarakat tetapi dimanfaatkan secara tidak wajar oleh kepala desa atau perangkat desa yang tidak jujur. Penipuan adalah tindakan yang dirancang untuk menyakinkan seseorang untuk menandatangani kontrak sambil mempertahankan penilaian yang salah atau kesalahan penilaian yang ada. Menggunakan aset orang lain untuk meningkatkan kekayaan sendiri sementara melakukannya secara diam-diam mendorong keputusan yang buruk (Setiyowati et al., 2022). Adapun Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mendeteksi

kecurangan dan pencegahan kecurangan dalam upaya tindakan kecurangan laporan keuangan desa.

## II. LANDASAN TEORI

### 1. Mendeteksi kecurangan

Fraud adalah konsep penipuan disebabkan oleh 3 hal, yaitu (1) tekanan kecurangan dalam keadaan individu, seperti masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang dan harapan atau tujuan yang tidak realistis. (2) Peluang muncul dari ketidakefektifan pengendalian organisasi yang tidak efektif meliputi; ketergantungan berlebihan pada bawahan, kelemahan dalam proses otorisasi dan persetujuan manajemen, kurangnya penjelasan menyeluruh informasi keuangan pribadi, tidak ada pemisahan antara otorisasi dan penyimpanan aset, tidak ada verifikasi aktivitas independen, dan tidak ada perhatian terhadap detail donasi yang memungkinkan penipuan. (3) Pembenaan. Terjadi pada seseorang atau sekelompok orang yang membuat pembenaan atas kecurangan yang diimplementasikan. Penipu biasanya mencari alasan untuk membenarkan bahwa yang dilakukannya bukanlah pencurian atau penipuan. (Rahman et al., 2022)

### 2. Pencegahan kecurangan

Kecurangan adalah setiap perlakuan atau tindakan yang disengaja yang dapat merugikan beberapa pihak dalam organisasi. Penipuan dapat mencakup segala macam hal yang muncul dalam pikiran seseorang dan bahwa seseorang berusaha untuk mengambil keuntungan dari orang lain secara tidak benar atau dengan memaksakan kebenaran dengan cara yang tersembunyi, licik dan tidak jujur yang mengakibatkan orang lain tertipu. Kecurangan sering terjadi karena adanya kesempatan atau kesempatan, tekanan dan sikap, atau rasionalisasi (pembenaan). Penipuan dapat terjadi ketika ada kesempatan untuk melakukan penipuan. Kemudian kecurangan sering terjadi juga karena tekanan kehidupan pribadi maupun tekanan internal organisasi. Penipuan atau sering disebut dengan kecurangan memerlukan tindakan pencegahan, karena kecurangan merupakan perbuatan yang sulit untuk dideteksi. Ada beberapa langkah yang harus diambil untuk mengungkap penipuan. Penipuan dapat dicegah dengan menciptakan dan mendorong budaya kejujuran, keterbukaan dan sikap suka menolong dan dengan menghilangkan kesempatan yang biasanya akan mengarahkan seseorang untuk melakukan penipuan. Organisasi yang melakukan pencegahan kecurangan dengan menggunakan metode ini akan memiliki tingkat kecurangan yang jauh lebih rendah daripada organisasi yang tidak menggunakan metode. Anti-fraud adalah kegiatan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa pejabat, manajemen, dan anggota organisasi lainnya telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tiga tujuan utama telah terpenuhi. Keandalan, efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kecurangan dapat dicegah dengan membangun dan meningkatkan struktur pengendalian internal yang baik, meningkatkan budaya perusahaan, memperketat tindakan pengendalian dan membuat audit internal menjadi lebih efektif (Syamsuddin Syam & Purwanto Wahyudi, 2022).

Penipu atau penipuan adalah objek utama dalam akuntansi forensik. Kecurangan adalah pemahaman umum yang mencakup berbagai cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, digunakan oleh satu orang untuk mendapatkan keuntungan atas orang lain melalui perilaku yang tidak benar. Kecurangan adalah penipuan yang

disengaja, biasanya dalam bentuk kebohongan, penjiplakan, dan pencurian. Penipu berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang dan kekayaan, atau untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk menghindari pajak dan mengamankan kepentingan pribadi atau bisnis. Korupsi adalah salah satu bentuk penipuan, bukan merupakan budaya tetapi cerminan dari sistem ekonomi dan kelembagaan yang meningkatkan keuntungan atau keuntungan dari korupsi. (Saputra et al., 2019)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Akuntabilitas**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terwujudnya good governance di Indonesia. (Saputra et al., 2019) Akuntabilitas keuangan menjadi fokus utama Pelaporan penggunaan dana publik yang akurat dan tepat waktu, yang biasanya dilakukan melalui laporan audit profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan secara efisien dan efektif untuk tujuan yang dimaksudkan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. (Nafidah & Anisa, 2017) Mekanisme pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dapat disajikan, salah satunya melalui media resmi milik pemerintah. Agar pelaporan keuangan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan memiliki struktur yang sama, salah satu upaya yang dikembangkan oleh pengawas keuangan dan kementerian yang terkait adalah menciptakan aplikasi keuangan yang terstandar (Aziiz, 2019). Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan pemerintah saat itu (Arja Sadjarto, 2000).

### **2. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Peran SDM dalam perusahaan/organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antara organisasi dan SDM menjadi fokus perhatian pimpinan. Melihat pentingnya pengembangan kemampuan/kompetensi SDM dalam organisasi, maka perlu adanya program-program yang dikembangkan oleh organisasi itu sendiri dalam meningkatkan kompetensi SDM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu sebagai dasar peningkatan kinerja organisasi. SDM dalam hal ini sebagai aktor yang berperan aktif dalam menggerakkan perusahaan/ organisasi dalam mencapai tujuannya. Kompetensi SDM yang tercermin pada hasil karya atau kinerja individu yang diciptakan melalui

kemampuan (kecakapan) yang dimiliki (meliputi: pengetahuan, ketrampilan, perilaku dan sikap) akan dapat membedakan antara mereka yang berkualitas baik atau “biasa-biasa saja”. (Saputra et al., 2019) Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan.(Arthana, 2019) Dalam mempertahankan kompetensi knowledge, manajer perusahaan atau yang mewakili hendaknya mampu memberi pelatihan karyawan agar karyawan mempunyai pengalaman yang mampu menunjang pekerjaan, karyawan memiliki pengetahuan yang memadai atas pekerjaan yang dihadapi dan karyawan mempunyai informasi yang memadai mengenai sistem dan prosedur kerja yang diberlakukan perusahaan.(Callista, 2016)

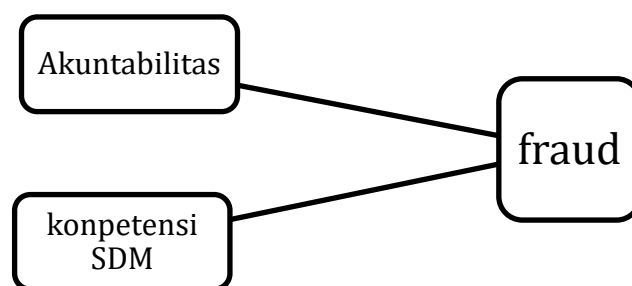
Pemerintahan Desa harus mempersiapkan sistem kerja yang sebaik-baiknya dan SDM yang ahli serta memberdayakan fasilitator seperti tenaga pendamping yang utamanya dalam pengelolaan keuangan dan teknologi informasi. Dengan dimilikinya SDM yang terampil di Desa dan mampu mengaplikasikan semua yang di amanatkan oleh UU dan Regulasi lainnya tentang Dana Desa, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa akan tercapai sehingga terhindar dari segala jenis fraud, terlebih dengan adanya sanksi yang sangat mengikat dalam pelaksanaan UU ini maka semua pihak yang terlibat dalam keuangan Desa ini harus bersinergi dan berkomitmen untuk menindak tegas pelaku fraud atau melaporkannya melalui *whistleblowing* sistem dengan mekanisme di desa.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya yaitu:

H1: Praktek akuntabilitas berpengaruh terhadap fraud dalam pengelolaan keungan desa

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap fraud dalam pengelolaan keuangan desa

Sesuai dengan rumusan hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini, maka dapat dibuat kerangka konseptualnya. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini :



### III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu. mengumpulkan informasi, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, informasi dan data, serta menjawab pertanyaan tentang peristiwa atau kejadian. Dalam penelitian ini, lebih ditekankan pada menjawab pernyataan kuesioner penelitian dengan pemikiran formal. (Saputra et al., 2019) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi yang valid, yang tujuannya adalah untuk menemukan, membuktikan, dan mempromosikan informasi sedemikian rupa sehingga

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah bisnis .(Arthana, 2019).

Teknik sampling yang digunakan adalah pemilihan sampel menggunakan metode purposive random sampling dengan berdasarkan pertimbangan (judgement) yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada tujuan dan masalah penelitian. Dalam penelitian ini sampel diambil dari aparat desa dan memiliki masa tugas telah melewati satu tahun sehingga diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai, pemahaman terhadap kondisi lingkungan kerja yang cukup, dan memiliki persepsi dan pertimbangan yang komprehensif terhadap kecurangan (fraud). Jumlah aparat desa yang memenuhi kriteria sampling tersebut adalah sebanyak 30 orang responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang digunakan berupa opini dari subyek penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei yaitu melalui kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan personally administered questionnaires (kuesioner secara personal) yang artinya peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya tentang kuesioner dan dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden (Soukotta & Utami, 2019).

**IV. HASIL PENELITIAN**

Statistik deskriptif yaitu gambaran atau deskripsi data yang disajikan dengan varians, minimum, maximum, sum, range, mean (mean), standar deviasi, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2016: 19). Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.Uji Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics**

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| TotalX1            | 30 | 38,00   | 42,00   | 40,6667 | 1,09334        |
| Totalx2            | 30 | 39,00   | 44,00   | 40,5667 | 1,16511        |
| TotalY1            | 30 | 20,00   | 24,00   | 22,3667 | ,88992         |
| Valid N (listwise) | 30 |         |         |         |                |

Sumber: Data yang diolah dalam SPSS 25 (2023)

Dari Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa data yang digunakan berjumlah 30 data yaitu. dari total 2 sampel. Standar deviasi variabel X1 (mendeteksi penipuan) adalah 1,09334, nilai minimum 38,00, nilai maksimum 42,00, dan nilai rata-rata 40,6667. Standar deviasi variabel X2 (pencegahan penipuan) adalah 1,16511 dengan nilai minimum 39,00, nilai maksimum 44,00, dan nilai rata-rata 40,5667. Sedangkan variabel Y (Upaya Penipuan Laporan Keuangan) memiliki standar deviasi sebesar ,88992 dengan nilai minimum 20,00, nilai maksimum 24,00, dan nilai rata-rata 22,3667.

**Analisis Data**

Langkah selanjutnya setelah kuesioner diisi dan dilengkapi oleh responden adalah metode analisis yang tepat. Kemudian, bobot tanggapan yang dinyatakan oleh masing-masing variabel diberikan dan dirangkum. Metode analisis yang digunakan



peneliti adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis dan analisis linier berganda. Peneliti mengembangkan kuesioner dengan cara mengadopsi dari penelitian sebelumnya dan juga mengembangkan sendiri mengacu pada indikator teori yang ada. Kuesioner yang digunakan akan mengukur satu variabel dependen dan dua variabel independen sesuai model penelitian yang telah ditetapkan. Skala yang digunakan untuk pengukuran adalah skala likert yang dinyatakan dengan rentang angka 1 sampai dengan angka 5. (Saputra et al., 2019)

**Uji Regresi Linear Berganda**

Model analisis data yang digunakan dalam model regresi berganda adalah model yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi berganda, variabel dependen (terkait) dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel independen sehingga terjalin hubungan fungsional antar variabel dependen. Hasil uji analisis linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2.** Uji regresi linear berganda  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1 (Constant) | 53,715                      | 9,860      |                           | 5,448  | ,000 |
| TotalX1      | -,469                       | ,147       | -,577                     | -3,183 | ,004 |
| TotalX2      | -,302                       | ,1 38      | -,396                     | -2,185 | ,038 |

a. Dependent Variable: TotalY1

Sumber: data yang diolah dalam SPSS (2023)

Dari tabel di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 53,715 dan nilai koefisien untuk variabel mendeteksi kecurangan sebesar -,469 dan pencegahan kecurangan sebesar -,302 maka persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$\text{Upaya tindakan kecurangan laporan keuangan desa} = 53,715 + -,469\text{MK} + -,302\text{PC} + e$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh, mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Nilai kostanta sebesar 53,715 bertanda positif yang artinya apabila variabel mendeteksi kecurangan dan pencegahan kecurangan bernilai 0 maka variabel dependen upaya tindakan kecurangan laporan keuangan desa mengalami kenaikan 53,715
- b. Nilai koefisien regresi untuk fraud detection (X1) adalah -0,469 yang bertanda negatif yang berarti variabel fraud detection sebesar 1 satuan. Sehingga variabel dependen yaitu kecurangan pelaporan keuangan desa juga meningkat sebesar -.469 dan sebaliknya.
- c. Nilai koefisien regresi variabel pencegahan kecurangan (X2) sebesar -0,302 dan bernilai positif yang berarti variabel pencegahan kecurangan sebesar 0. maka variabel upaya kecurangan dalam laporan keuangan desa meningkat sebesar -,302 dan sebaliknya

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

**Tabel 4.** Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

| ANOVA <sup>a</sup>                          |            |                |    |             |       |                   |
|---|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model                                       |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
| 1   | Regression | 6,599          | 2  | 3,299       | 5,443 | ,010 <sup>b</sup> |
|   | Residual   | 16,368         | 27 | ,606        |       |                   |
|   | Total      | 22,967         | 29 |             |       |                   |
| a. Dependent Variable: TotalY1              |            |                |    |             |       |                   |
| b. Predictors: (Constant), Totalx2, TotalX1 |            |                |    |             |       |                   |

Sumber : data yang diolah dalam SPSS 23 (2023)

Berdasarkan hasil uji ANOVA pada Tabel 4 diperoleh nilai F sebesar 5,443 dengan signifikansi 0,010, < 0,05 berarti model regresi yang digunakan layak untuk menguji data.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui besaran proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.** Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

| Model Summary                               |                   |          |                   |                            |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                                       | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1   | ,536 <sup>a</sup> | ,287     | ,235              | ,77860                     |
| a. Predictors: (Constant), Totalx2, TotalX1 |                   |          |                   |                            |
| b. Dependent variable : TotalY1             |                   |          |                   |                            |

Sumber: data yang diolah dalam SPSS 25 (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 5, hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) memberikan nilai R-squared sebesar 0,287. Artinya variabel kecenderungan manipulasi laporan keuangan desa yang curang yang merupakan variabel terikat dapat dijelaskan sebesar 0,287 dengan variabel bebas yaitu deteksi kecurangan dan pencegahan kecurangan.

**Uji Signifikansi Variabel (Uji statistik T)**

Uji-t adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen yang diformulasikan dalam model. Hasil uji statistik disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.** Uji Statistik T

| Coefficients <sup>a</sup>      |            |                             |            |                           |        |      |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model                          |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|                                |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                              | (Constant) | 53,715                      | 9,860      |                           | 5,448  | ,000 |
|                                | TotalX1    | -,469                       | ,147       | -,577                     | -3,183 | ,004 |
|                                | Totalx2    | -,302                       | ,138       | -,396                     | -2,185 | ,038 |
| a. Dependent Variable: TotalY1 |            |                             |            |                           |        |      |

Sumber: data yang diolah dalam SPSS 25 (2023)



Berdasarkan tabel diatas upaya tindakan fraud laporan keuangan desa dapat dipengaruhi oleh indikator – indikator masing – masing variabel independen hal itu dapat dilihat sebagai berikut :

- a.  $X_1$  : Mendeteksi kecurangan berpengaruh terhadap upaya tindakan fraud dalam laporan keuangan desa . kriteria yang digunakan dalam pengujian ini yaitu dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = Dengan demikian berdasarkan tabel diatas diketahui nilai  $t$  hitung sebesar 5,448 dan bernilai positif. Karena  $t_{hitung} = 5,448 < t_{tabel} = 1.689$  dengan arah positif dan signifikan dinilai ,000 > 0.05 artinya  $X_1$  diterima yang berarti terdapat pengaruh dan signifikan variabel mendeteksi fraud terhadap upaya tindakan kecurangan laporan keuangan desa .
- b.  $X_2$  : Pencegahan fraud berpengaruh terhadap upaya tindakan kecurangan laporan keuangan desa . kriteria yang digunakan dalam pengujian ini yaitu dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) =0,05 dengan demikian berdasarkan tabel diatas diketahui nilai  $t$  hitung sebesar -3,183 dan bernilai negatif. karena  $t_{hitung} = -3,183 < t_{tabel} = 1.689$  dan nilai signifikan ,038 < 0,05 artinya bahwa  $X_2$  diterima yaitu terdapat pengaruh dan signifikan variabel pencegahan fraud terhadap upaya tindakan kecurangan laporan keuangan

## Pembahasan

Hipotesis 1 (satu) diterima yang berarti akuntabilitas berpengaruh terhadap mendeteksi kecurangan dalam upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa penting bagi semua pemerintahan desa untuk memahami pentingnya memahami dan menerapkan konsep akuntabilitas karena pencegahan fraud dapat dimulai dari minimnya akuntabilitas dan pengendalian internal. Hasil tersebut memperjelas bahwa akuntabilitas bukan hanya merupakan laporan keuangan yang reliable juga menunjukkan efektivitas untuk semua operasi dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merupakan sebuah operasional mulai dari perencanaan, proses dan pertanggungjawaban yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diadopsi oleh pemerintah desa untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Hasil uji hipotesis 2 (dua) yaitu ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Dalam mengelola keuangan desa, harus memiliki kompetensi SDM yang berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut perlu dilakukan selain untuk tata kelola keuangan yang baik, dapat juga untuk tata kelola pemerintahan desa dan mampu berdampingan serta menghindari asimetri informasi. Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang membutuhkan profesionalisme dalam pengelolaannya, sehingga tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang sudah ditentukan serta disesuaikan dengan kepentingan pemerintah desa yang bersinergi dengan masyarakatnya untuk mencapai pendapatan desa yang optimal dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa. Kompetensi aparatur (SDM) yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran di tingkat keuangan desa, sehingga segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan (fraud).

#### IV. KESIMPULAN

Mengingat hipotesis satu dan dua didukung oleh hasil penelitian analisis regresi berganda, maka Fraud detection dan fraud prevention berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan uang desa. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan uang desa oleh pemerintah desa, diperlukan sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah desa, dalam penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, penting untuk selalu mempertimbangkan prinsip moral dan etika saat mengelola uang. Dari hal tersebut para petinggi aparatur desa dapat mengantisipasi dan memperbaiki kecurangan yang ada dalam keuangan desa karena ketika terjadi kecurangan maka sama halnya dengan pencurian yang berdampak pada nama buruk dan citra aparatur desa yang rendah dan kepercayaan terhadap aparatur pun akan hilang. Karena dana desa merupakan hak bagi semua warga yang ada di dalamnya dan bukan merupakan hak pribadi atau seseorang. Ada beberapa keterbatasan penelitian ini yang tidak boleh diabaikan.

Beberapa keterbatasan dan saran yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: Karena penelitian ini mengandalkan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner, maka penelitian ini memiliki keterbatasan yang melekat. Salah satu kelemahan tersebut adalah kemungkinan perbedaan perspektif antara peneliti dan responden karena mereka tidak dapat menjelaskan pertanyaan atau komentar satu sama lain. Akibatnya, penelitian tidak diragukan lagi lebih akurat ketika pendekatan wawancara digunakan, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang reaksi responden terhadap pernyataan atau pertanyaan. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintahan desa yang ada di Provinsi Sul-Sel sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan sampel yang sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arja Sadjiarto. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), pp.138-150. <https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.138-150>
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Callista, N. (2016). Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt.tresnamuda Sejati Cabang Surabaya. *Agora*, 4(2), 45–50.
- Dewi, N. K. P. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1071–1082. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p12>
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh) Jihan. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(0), 455–468.

- <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Mardianto, M., & Tiono, C. (2019). Analisis Pengaruh Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Benefita*, 1(1), 87–103. <https://doi.org/10.22216/jbe.v1i1.3349>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Putra, A. R., & Kusnoegroho, Y. A. (2021). Pengujian Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(2), 172–185. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i2.6269>
- Rahman, K., Anggraeni, R., & Febriana, D. (2022). Fraud Triangle Mendeteksi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Dana Desa. *Jakk*, 5(2), 94–100.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi: Universitas Warmadewa*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Setiyowati, S. W., Irianto, M. F., & Tyasari, I. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Kompetensi Aparatur. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 62–72. <https://doi.org/10.35138/organum.v5i1.197>
- Soukotta, V., & Utami, I. (2019). Apakah Gaya Kepemimpinan Mendukung Potensi Pengungkapan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa? *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(2), 223–238.
- Syamsuddin Syam, S. S., & Purwanto Wahyudi. (2022). Pencegahan Fraud Dalam Perspektif Metafora Amanah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 159–174. <https://doi.org/10.24252/assets.v1i1.29296>